

# **PERAN PMDN DAN PMA TERHADAP PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA**

**Suryatno Wiganepdo S.<sup>1</sup>, Herman Soegoto<sup>2</sup>**

[surwiga@gmail.com](mailto:surwiga@gmail.com)

**Universitas Komputer Indonesia<sup>1,2</sup>**

Jl. Dipati Ukur 102-118, 40132

Bandung, Jawa Barat

Indonesia

*Received Date* : 26.10.2021

*Revised Date* : 22.11.2021

*Accepted Date* : 29.03.2022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA  
BANDUNG

### **ABSTRACT**

*Indonesian government try to reduce the poverty rates in Indonesia by support the number of investmen from Indonesian citizen investors and foreign investors. However, the poverty rates until 2020 still high which is about ten percent from total citizens. The high of poverty rates make the writer to conduct research to find out the role of Domestic Investment (PMDN) and Foreign Investment (PMA) to reduce poverty in Indonesia. This study uses quantitative methods by processing data on the number of PMDN and PMA and the magnitude of poverty rates issued by the Central Bureau of Statistics, Bank Indonesia and the Ministry of Manpower and Transmigration. The analysis uses the method of panel least square dummy variables by conducting a combination analysis of time series data and cross section data by taking samples in 33 provinces in Indonesia. The amount of data used is a ten-year span from 2010 to 2019. The results of the study prove that when there is an increase in domestic investment in 30 provinces in Indonesia, the poverty rate in Indonesia will decrease. The same result also occurred that foreign investment has a significant effect on the poverty rate in Indonesia. Although in general PMDN and PMA have a positive and significant effect in helping accelerate the reduction of poverty in Indonesia, based on the results of the analysis there are one to two provinces where PMDN or PMA do not have a positive effect and significant to reduce poverty in the province. Based on the results of this analysis, it is expected that the government can continue to encourage and create rules and policies that help increase the amount of investment through PMDN and PMA in all provinces, especially provinces that have a positive impact with the PMDN and PMA to improve people's welfare while reducing poverty in all provinces in Indonesia.*

**Keywords** : *PMDN, PMA, Investment, Poverty, Indonesia*

### **ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat antara lain dengan mendorong investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian hingga tahun 2020 kategori penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sekitar sepuluh persen dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut seberapa besar peran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif dengan mengolah data jumlah PMDN dan PMA serta besarnya Angka Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia dan

---

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Analisis menggunakan metoda panel least square dummy variabel dengan melakukan analisis kombinasi data time series dan data cross section dengan mengambil data pada 33 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah data yang digunakan adalah rentang sepuluh tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa saat terjadi kenaikan penanaman modal dalam negeri di tiga puluh provinsi di Indonesia, maka angka kemiskinan di Indonesia akan menurun. Hasil yang sama juga terjadi bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. Walaupun secara umum PMDN maupun PMA berpengaruh positif dan signifikan dalam membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia, namun berdasarkan hasil analisis ada satu sampai dua provinsi dimana PMDN ataupun PMA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi tersebut. Berdasarkan hasil analisa ini diharapkan pemerintah dapat terus mendorong dan menciptakan aturan maupun kebijakan yang membantu peningkatan jumlah investasi melalui PMDN dan PMA di seluruh provinsi terutama provinsi yang memiliki dampak positif dengan adanya PMDN dan PMA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan Angka Kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia.

**Kata Kunci : PMDN, PMA, Investasi, Kemiskinan, Indonesia**

## PENDAHULUAN

Pemerintah dari semua negara di dunia ini senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Berbagai kebijakan dilakukan untuk mempercepat kenaikan tingkat kesejahteraan rakyat sekaligus menurunkan angka kemiskinan masyarakat. Menurut world bank orang miskin tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Selama 38 tahun terakhir persentase masyarakat miskin di dunia terus mengalami penurunan dari sekitar 42.7% di tahun 1981 menjadi 7 % di tahun 2019. Menurut World Bank, kategori miskin apabila tingkat pendapatan seseorang rata-rata di bawah \$3.2 per hari atau di bawah 45.700 rupiah per hari. Extereme poverty apabila penghasilan rata-rata per hari di bawah \$1.9. Negara-negara dimana rakyatnya hidup pada kondisi *extreme poverty* cenderung memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang buruk (World Bank, 2020). Kemiskinan menyebabkan terganggunya *family functioning* (Banovcinova, A., Levicka, J., & Veres, M, 2014). Hidup dalam kemiskinan memiliki dampak negative terhadap seluruh keluarga (Dodge, K. A., Pettit, G. S., & Bates, J. E., 1994), (Gerbery, D., Bodnárová, B., & Filadelfiová, J., 2007), (Currie, J., & Stabile, M., 2003). *Corona virus* yang mulai menyebar tahun 2020 mempunyai dampak sangat buruk terhadap kesehatan masyarakat dan memiliki implikasi yang serius terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan social. *Poverty* dan *extreme poverty* akibat corona virus meningkat di seluruh negara (United Nations, 2020). *Corona virus* sangat berdampak terhadap *low-income families* (Howes, et.al., 2020).

Indonesia sebagai negara berkembang juga masih menghadapi kendala bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang masih berada pada kategori miskin. Tahun 2010 kategori penduduk miskin di Indonesia sekitar 13.3% dan berangsur-angsur terus menurun sampai tahun 2019 menjadi sekitar 9.3% dari total penduduk Indonesia. Namun tahun 2020 karena dampak *corona virus* tingkat kemiskinan meningkat menjadi sekitar 10% dari total penduduk Indonesia (OECD, 2021). Pemerintah Indonesia terus berupaya agar angka kemiskinan terus menurun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah terus mendorong investasi baik yang dananya bersumber dari luar negeri maupun yang bersumber dari dalam negeri.

Investasi yang bersumber dari dalam negeri atau atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. PMDN merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Aturan

terkait PMDN mengacu pada undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk memudahkan koordinasi penanaman modal di Indonesia dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tugasnya melakukan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan. Pada periode April-Juni 2021 jumlah penanaman modal dalam negeri di seluruh provinsi di Indonesia sebesar 106.252 milyar rupiah (BKPM, 2021). PMDN memiliki dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan (Permana, 2019), (Agustini & Kurniasih, 2017), (Momongan, 2013). Namun demikian peneliti lain menyatakan bahwa PMDN tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Dorodjatun & Susanto, 2016).

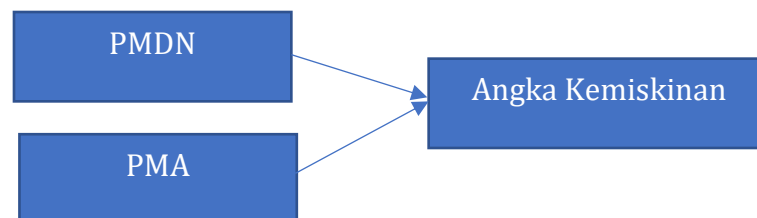
Penanaman Modal Asing atau (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur penanaman modal di Indonesia, termasuk untuk PMA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hadir sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai minimum investasi asing di Indonesia adalah Rp 10 miliar (tidak termasuk harga tanah dan bangunan). Jumlah minimal modal yang disetor ke bank di Indonesia adalah Rp 2,5 miliar (Kementerian Investasi, 2021).

Investasi yang dilakukan oleh investor luar negeri diharapkan mampu untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan suatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Do, et.al., 2021) di Vietnam menyimpulkan bahwa investasi asing cenderung menurunkan tingkat kemiskinan di suatu provinsi. Hasil yang sama juga disimpulkan oleh (Hanim, 2021) yang menyatakan *foreign direct investment* memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Anetor, Esho & Verhoef, 2020) menyimpulkan bahwa *foreign direct investment and foreign aid* memiliki dampak negative terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di negara-negara di Afrika yang diteliti. Karena perbedaan temuan dari beberapa peneliti yang berbeda terkait pengaruh *Foreign Direct Investment* membuat penulis memandang perlu untuk melihat pengaruh FDI tersebut di Indonesia.

Sehubungan dengan perbedaan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian pada seluruh provinsi di Indonesia untuk memastikan apakah PMDN maupun PMA berpengaruh positif terhadap

penurunan angka kemiskinan di seluruh provinsi yang diteliti ataukah hanya berpengaruh signifikan pada sebagian provinsi saja sementara pada sebagian provinsi lainnya tidak ada dampaknya. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagaimana mengurangi angka kemiskinan dengan melalui PMDN dan PMA terutama di provinsi yang memiliki dampak yang positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di Indonesia adalah pada lokasi penelitian peneliti-peneliti sebelumnya hanya pada satu atau dua provinsi saja sedangkan pada penelitian kali ini dilakukan pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Perbedaan lainnya adalah waktu pengambilan data yang mengambil data terbaru yaitu data tahun 2010 sampai 2019. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan yang tepat terkait penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Model penelitian merumuskan keterkaitan antara dua variabel independent yaitu PMDN dan PMA dengan variabel dependennya adalah Angka Kemiskinan. Hubungan keterkaitan antara ketiga variabel tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



**Gambar 1. Pengaruh PMDN dan PMA terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia**

Berdasarkan model pada gambar 1 di atas maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1: Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia.

Hipotesis 2: Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia.

---

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel yang berupa gabungan data time series selama 10 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2019, serta data Cross Section dari 33 provinsi di Indonesia. Alasan pemilihan 33 propinsi juga untuk membandingkan dampak PMA dan PMDN untuk provinsi di pulau jawa dan di luar pulau jawa yang kemungkinan karakteristik karakteristik ekonomi dan sosial budaya yang juga berbeda. Analisa data panel menggunakan Least Square Dummy Variabel Method. Variabel independennya adalah Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sementara variabel dependennya adalah Angka Kemiskinan. Analisis menggunakan regresi data panel. Analisa data panel bersifat lebih informatif, lebih bervariasi, efisien, bisa terhindar dari multikolinearitas serta lebih dapat diandalkan untuk menguji data cross section dan time series secara bersamaan dan juga mampu meminimumkan bias (Baltagi, 2005).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap penurunan angka kemiskinan dianalisa dengan memanfaatkan data dari 33 provinsi di Indonesia. Data tersebut perpaduan data yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintahan Indonesia yang terkait.

Model analisa menggunakan metoda regresi data panel Least Square Dummy Variabel (LSDV), dengan persamaan hubungan keterkaitan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \alpha_1 D_{1i} + \alpha_2 D_{2i} + \dots + \alpha_{33} D_{33i} + \mu_{it}$$

Dimana :

$Y_{it}$  = penurunan angka kemiskinan

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi

$D_i$  = Dummy

$X_{1it}$  = penanaman modal dalam negeri.

$X_{2it}$  = penanaman modal asing.

$i$  = Propinsi;  $i = 1, 2, 3 \dots n$

$t$  = Periode waktu;  $t = 1, 2, 3 \dots T_i$

$\alpha_{1-33}$  = slope coefficient dummy

$\mu_{it}$  = error term.

Pengujian menggunakan data sekunder dari tiga puluh tiga provinsi di Indonesia selama sepuluh tahun dengan menggabungkan analisa data time series dan cross section. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia. Analisis dengan metode regresi panel data yang menggabungkan data time series dan cross section sangat sesuai untuk memecahkan masalah ekonomi dan bisnis (Ekananda, 2018).

Tabel 1 adalah data Penanaman Modal Dalam Negeri di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa jumlah penanaman modal dalam negeri berbeda-beda untuk setiap provinsi.

**Tabel 1. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia**

No	Provinsi	PMDN Propinsi di Indonesia								
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
		Miliar IDR	Miliar IDR	Miliar IDR	Miliar IDR	Miliar IDR	Miliar IDR	Miliar IDR	Miliar IDR	Miliar IDR
1	Aceh	3.606,90	970,00	782,80	2.456,10	4192,4	5110,3	3.636,4	60,2	259,40
2	Sumatera Utara	19.749,00	8.371,80	11.683,60	4.864,2	4287,4	4.223,9	5.068,9	2.550,30	1.673,0
3	Sumatera Barat	3.026,60	2.309,50	1.517,00	3.795,6	1552,5	421,1	677,80	885,30	1.026,2
4	Riau	26.292,20	9.056,40	10.829,80	6.613,7	9.943,0	7.707,6	4.874,3	5.450,40	7.462,6
5	Jambi	4.437,40	2.876,50	3.006,60	3.884,4	3.540,2	908,00	2.799,6	1.445,70	2.134,9
6	Sumatera Selatan	16.921,10	9.519,80	8.200,20	8.534,1	10.944,1	7.042,8	3.396,0	2.930,60	1.068,9
7	Bengkulu	5.458,10	4.902,80	296,50	949,1	553,9	7,8	109,6	52,60	-
8	Lampung	2.428,90	12.314,70	7.014,80	6.031,8	1102,3	3.495,7	1.325,3	304,20	824,40
9	Bangka Belitung	2.915,20	3.112,90	1.734,70	2.202,0	1.023,7	615,5	608,2	533,50	514,40
10	Kepulauan Riau	5.656,40	4.386,00	1.398,00	492,5	612,1	28,5	417,7	43,50	1.370,40
11	DKI Jakarta	62.094,80	49.097,40	47.262,30	12.216,9	15.512,7	17.811,5	5.754,5	8.540,10	9.256,40
12	Jawa Barat	49.284,20	42.278,20	38.390,60	30.360,2	26.272,9	18.726,9	9.006,1	11.384,00	11.194,30
13	Jawa Tengah	18.654,70	27.474,90	19.866,00	24.070,4	15.410,7	13.601,6	12.593,6	5.797,10	2.737,8
14	DI Yogyakarta	6.298,70	6.131,70	294,60	948,6	362,4	703,9	283,8	334,00	1,60
15	Jawa Timur	45.452,70	33.333,10	45.044,50	46.331,6	35.489,8	38.132,0	34.848,9	21.520,3	9.687,5
16	Banten	6.298,80	18.637,60	15.141,90	12.426,3	10.709,9	8.081,3	4.008,7	5.117,5	4.298,6
17	Bali	7.393,20	1.548,90	592,50	482,3	1.250,4	252,8	2.984,7	3.108,0	313,40
18	Nusa Tenggara Barat	3.519,00	4.135,10	5.413,50	1.342,8	347,8	212,5	1.398,0	45,40	42,30
19	Nusa Tenggara Timur	3.752,60	4.246,10	1.081,90	822,2	1.295,7	3,6	17,6	14,40	1,00
20	Kalimantan Barat	7.699,10	6.591,40	12.380,90	9.015,5	6.143,5	4.320,8	2.522,1	2.811,0	1.404,0
21	Kalimantan Tengah	8.591,90	13.091,60	3.037,80	8.179,1	1.270,1	980,4	1.835,3	4.529,6	376,0
22	Kalimantan Selatan	10.061,00	9.975,20	2.981,90	6.163,0	2.060,4	2.616,5	8.299,2	3.509,8	2.118,3
23	Kalimantan Timur	26.352,90	27.298,80	11.833,50	6.885,1	10.533,10	13.501,80	16.034,6	5.889,3	6.569,1
24	Sulawesi Utara	8.591,90	4.320,10	1.488,20	3.345,7	270,6	83	66,8	678,5	331,6
25	Sulawesi Tengah	4.438,80	8.488,90	1.929,70	5.069,6	968,4	95,8	605,3	602,8	2.620,2
26	Sulawesi Selatan	5.672,60	3.275,90	1.969,40	1.081,2	921,5	4.949,6	921	2.318,9	3.986,3
27	Sulawesi Tenggara	3.827,10	1.603,40	3.148,70	3.334,6	2015,4	1.249,9	1.261,6	907,3	59,00
28	Gorontalo	844,40	2.666,80	888,40	1.794,2	94,3	45,1	84,4	164,9	11,8
29	Sulawesi Barat	1.187,20	3.144,20	660,20	2.202,5	1103,8	690,1	685,1	228,6	218,6
30	Maluku	283,20	1.013,50	52,30	84,1	-	-	-	3,40	0,10
31	Maluku Utara	682,70	2.276,30	1.150,60	8,80	48,2	156,3	1114,9	320,5	13,5
32	Papua Barat	380,20	50,90	59,20	10,60	63,4	100	304,00	45,8	47,2
33	Papua	567,70	104,60	1.217,90	220,50	1275,20	249,00	584,30	54,70	1378,90
	Indonesia	386.498,40	328.604,90	262.350,50	216.230,80	179.465,90	156.126,30	128.150,60	92.182,00	76.000,70

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas terlihat bahwa penanaman modal dalam negeri terbesar masih didominasi oleh propinsi di pulau jawa, yaitu: DKI Jakarta, jawa barat, jawa tengah, jawa timur dan banten. Untuk luar pulau jawa



terdapat: sumatera utara, riau, sumatera selatan, Kalimantan selatan, dan Kalimantan timur.

Tabel 2 berisi data tentang jumlah penanaman modal asing di Indonesia. Berdasarkan data pada Tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2019 provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Maluku Utara menarik investor luar negeri terbesar dengan menyerap lebih dari 1000 juta US\$.

**Tabel 2. Jumlah Penanaman Modal Asing di Indonesia**

No.	Provinsi	PMA Propinsi di Indonesia										
		2019 Juta US \$	2018 Juta US \$	2017 Juta US \$	2016 Juta US \$	2015 Juta US \$	2014 Juta US \$	2013 Juta US \$	2012 Juta US \$	2011 Juta US \$	2010 Juta US \$	2009 Juta US \$
1	Aceh	137.5	71.2	23.2	134.5	21.2	31.1	94.2	172.3	22.5	4.6	0.4
2	Sumatera Utara	379.5	1227.6	1514.9	1014.7	1246.1	550.8	887.5	645.3	753.7	181.1	139.7
3	Sumatera Barat	157.1	180.8	194.4	79.3	57.1	112.1	91.4	75.0	22.9	7.9	0.2
4	Riau	1034.0	1032.9	1061.1	869.1	653.4	1369.5	1304.9	1152.9	212.3	86.6	251.6
5	Jambi	54.6	101.9	76.8	61.0	107.7	51.4	34.3	156.3	19.5	37.2	40.5
6	Sumatera Selatan	736.5	1078.6	1182.9	2793.5	645.8	1056.5	485.9	786.4	557.3	186.3	56.8
7	Bengkulu	144.8	136.6	138.7	55.7	20.6	19.3	22.3	30.4	43.1	25.1	1.1
8	Lampung	155.2	132.3	120.6	85.7	257.7	156.5	46.8	114.3	79.5	30.7	32.7
9	Kep. Bangka Belitung	88.7	46.3	153.1	52.7	82.7	105.0	112.4	59.2	146.0	22.0	22.4
10	Kep. Riau	1363.4	831.3	1031.5	519.1	640.4	392.1	315.7	537.1	219.7	165.7	230.7
11	Dki Jakarta	4123.0	4857.7	4595.0	3398.2	3619.4	4509.4	2591.1	4107.7	4824.1	6429.3	5510.8
12	Jawa Barat	5881.0	5573.5	5142.9	5470.9	5738.7	6562.0	7124.9	4210.7	3839.4	1692.0	1934.4
13	Jawa Tengah	2723.2	2372.7	2372.5	1030.8	850.4	463.4	464.3	241.5	175.0	59.1	83.1
14	Di Yogyakarta	14.6	81.3	36.5	19.6	89.1	64.9	29.6	84.9	2.4	4.9	8.1
15	Jawa Timur	866.3	1333.4	1566.7	1941.0	2593.4	1802.5	3396.3	2298.8	1312.0	1769.2	422.1
16	Banten	1868.2	2827.3	3047.5	2912.1	2542.0	2034.6	3720.2	2716.3	2171.7	1544.2	1412.0
17	Bali	426.0	1002.5	886.9	450.6	495.8	427.1	390.9	482.0	482.1	278.3	227.2
18	Nusa Tenggara Barat	270.7	251.6	132.1	439.0	699.4	551.1	488.2	635.8	465.1	220.5	2.9
19	Nusa Tenggara Timur	126.8	100.4	139.0	58.2	69.9	15.1	9.9	8.7	5.5	3.8	4.0
20	Kalimantan Barat	532.3	491.9	568.4	630.7	1335.7	966.1	650.0	397.5	500.7	170.4	27.8
21	Kalimantan Tengah	283.5	678.5	641.0	408.2	933.6	951.0	481.6	524.7	543.7	546.6	4.9
22	Kalimantan Selatan	372.9	129.2	243.8	249.4	961.2	502.5	260.6	272.3	272.1	202.2	171.8
23	Kalimantan Timur	861.0	587.5	1285.2	1139.6	2381.4	2145.7	1335.4	2014.1	602.4	1092.2	79.9
24	Sulawesi Utara	220.5	295.9	482.9	382.8	88.0	98.4	65.7	46.7	220.2	226.8	57.7
25	Sulawesi Tengah	1805.0	672.4	1545.6	1600.3	1085.2	1494.2	855.0	806.5	370.4	138.5	3.3
26	Sulawesi Selatan	302.6	617.2	712.8	372.5	233.3	280.9	462.8	582.6	89.6	441.8	77.0
27	Sulawesi Tenggara	987.7	672.9	693.0	376.1	145.0	161.8	86.4	35.7	17.0	14.0	3.6
28	Gorontalo	171.3	40.8	41.3	12.7	6.9	4.1	25.7	35.3	12.5	0.8	-
29	Sulawesi Barat	10.1	24.7	11.4	20.6	2.0	16.3	2.5	0.2	5.6	37.3	-
30	Maluku	33.0	8.0	212.0	102.6	82.4	13.1	52.8	8.5	11.7	2.9	-
31	Maluku Utara	1008.5	362.8	228.1	438.9	203.8	98.7	268.5	90.3	129.8	246.0	5.9
32	Papua Barat	46.2	286.9	84.7	514.5	258.6	153.4	54.2	32.0	33.1	17.2	1.0
33	Papua	941.0	1132.3	1924.1	1168.4	897.0	1260.6	2360.0	1202.4	1312.0	329.6	1.8
	Indonesia	28208.8	29307.9	32239.8	28964.1	29275.9	28529.7	28617.5	24564.7	19474.5	16214.8	10815.2

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat diketahui bahwa penanaman modal asing terbesar ada di daerah: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua.

Berdasarkan data yang bisa dilihat pada Tabel 3 diketahui bahwa selama sepuluh tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2010 sampai 2019 angka kemiskinan secara rata-rata untuk seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan. Walaupun penurunan tersebut cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun berikutnya.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Per Propinsi (X 1000)									
		2019 Maret	2018 Maret	2017 Maret	2016 Maret	2015 Maret	2014 Maret	2013 Maret	2012 Maret	2011 Maret	2010 Maret
1	Aceh	819.44	839.49	872.61	848.44	851.59	881.26	840.71	876.56	894.81	861.85
2	Sumatera Utara	1282.04	1324.98	1453.87	1455.95	1463.67	1286.67	1339.16	1378.45	1481.31	1490.89
3	Sumatera Barat	348.22	357.13	364.51	371.56	379.61	379.20	407.47	397.86	442.09	430.02
4	Riau	490.72	500.44	514.62	515.40	531.39	499.88	469.28	481.31	482.05	500.26
5	Jambi	274.32	281.69	286.55	289.80	300.71	263.80	266.15	270.08	272.67	241.61
6	Sumatera Selatan	1073.74	1068.27	1086.92	1101.19	1145.63	1100.83	1110.37	1042.04	1074.81	1125.73
7	Bengkulu	302.30	301.81	316.98	328.61	334.07	320.95	327.35	310.47	303.60	324.93
8	Lampung	1063.66	1097.05	1131.73	1169.60	1163.49	1142.92	1163.06	1218.99	1298.71	1479.93
9	Kep. Bangka Belitung	68.38	76.26	74.09	72.76	74.09	71.64	69.22	70.21	72.06	67.75
10	Kep. Riau	128.46	131.68	125.37	120.41	122.40	127.80	126.66	131.22	129.56	129.66
11	DKI Jakarta	365.55	373.12	389.69	384.30	398.92	393.98	354.19	366.77	363.42	312.18
12	Jawa Barat	3399.16	3615.79	4168.44	4224.33	4435.70	4327.07	4297.04	4421.48	4648.63	4773.72
13	Jawa Tengah	3743.23	3897.20	4450.72	4506.89	4577.04	4836.45	4732.95	4863.41	5107.36	5369.16
14	DIY	448.47	460.10	488.53	494.94	550.23	544.87	550.20	562.11	560.88	577.30
15	Jawa Timur	4112.25	4332.59	4617.01	4703.30	4789.12	4786.79	4771.26	4960.54	5356.21	5529.30
16	Banten	654.46	661.36	675.04	658.11	702.40	622.84	656.25	648.25	690.49	758.16
17	Bali	163.85	171.76	180.13	178.18	196.71	185.20	162.52	160.95	166.23	174.93
18	NTB	735.96	737.46	793.78	804.44	823.89	820.82	830.85	828.33	894.77	1009.35
19	NTT	1146.32	1142.17	1150.79	1149.92	1159.84	994.67	993.56	1000.29	1012.90	1014.09
20	Kalbar	378.41	387.08	387.43	381.35	383.70	401.51	369.01	355.70	380.11	428.76
21	Kalteng	134.59	136.93	139.16	143.49	147.70	146.32	136.95	141.90	146.91	164.22
22	Kalsel	192.48	189.03	193.92	195.70	198.44	182.88	181.74	189.21	194.62	181.96
23	Kaltim	219.92	218.90	220.17	212.92	212.89	253.60	237.96	246.11	247.90	243
24	Sulawesi Utara	191.70	193.31	198.88	202.82	208.54	208.23	184.40	177.54	194.90	206.72
25	Sulawesi Tengah	410.36	420.21	417.87	420.52	421.62	392.65	405.42	409.60	423.63	474.99
26	Sulawesi Selatan	767.80	792.63	813.07	807.03	797.72	864.30	787.66	805.92	832.91	913.43
27	Sulawesi Tenggara	302.58	307.10	331.71	326.86	321.88	342.25	301.71	304.25	330	400.70
28	Gorontalo	186.03	198.51	205.37	203.19	206.84	194.17	192.59	187.73	198.27	209.89
29	Sulawesi Barat	151.40	151.78	149.76	152.73	160.48	153.89	154	160.55	164.86	141.33
30	Maluku	317.69	320.08	320.51	327.72	328.41	316.11	321.84	338.89	360.32	378.63
31	Maluku Utara	84.60	81.46	76.47	74.68	79.90	82.64	83.44	88.30	97.31	91.07
32	Papua Barat	211.50	214.47	228.38	225.80	225.36	229.43	224.27	223.24	249.84	256.25
33	Papua	926.36	917.63	897.69	911.33	859.15	924.40	1017.36	976.37	944.79	761.62
	Indonesia	25144.7 2	25949.8 0	27771.2 2	28005.3 9	28592.7 9	28280.0 1	28066.6 0	28594.6 4	30018.9 3	31023.3 9

Sumber: data diolah, 2020

Data yang ada pada tabel 1, 2 dan 3 selanjutnya dilakukan analisis menggunakan model data panel, dalam hal ini Penanaman Modal Dalam Negeri (X1) dan Penanaman Modal Asing (X2) sebagai variable independent dan Angka Kemiskinan sebagai variable dependent (Y) serta D1, D2...D33 adalah provinsi ke-1 sampai provinsi ke-33.

Berdasarkan hasil analisa data panel sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 diketahui bahwa secara bersama-sama Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai Rsquare sebesar 99 persen.

**Tabel 4 Hasil Analisis Data Menggunakan Metode Panel Least Square**

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Square  
 Date: 10/10/21 Time 13:05  
 Sample: 2010 2019  
 Periods Included: 10  
 Cross-sections included: 33  
 Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	891761.1	41205.93	21.64157	0.0000
X1	-5.69E-05	1.48E-05	-3.841767	0.0001
X2	-1.05E-05	1.23E-06	-8.531976	0.0000
D2	617956.2	58927.15	10.48678	0.0000
D3	-482404.9	58082.81	-8.305468	0.0000
D4	-249671.9	59279.30	-4.211789	0.0000
D5	-585944.1	58091.95	-10.08649	0.0000
D6	326518.4	59194.23	5.516052	0.0000
D7	-555456.2	58090.52	-9.561908	0.0000
D8	344249.8	58105.67	5.924548	0.0000
D9	-801340.2	58088.87	-13.79507	0.0000
D10	-715634.3	58379.92	-12.25823	0.0000
D11	-33053.84	84782.26	-0.389867	0.0000
D12	3895989.	93648.61	41.60221	0.0000
D13	3939478.	61286.26	64.27996	0.0000
D14	-330230.4	58103.03	-5.683532	0.0000
D15	4326344.	69628.90	62.13431	0.0000
D16	21085.87	67685.52	0.311527	0.0000
D17	-668295.5	58289.37	-11.46514	0.0000
D18	-20998.72	58163.32	-0.361030	0.7183
D19	199532.1	58105.85	6.433942	0.0007
D20	-414230.7	58476.65	-7.083694	0.0000
D21	-666234.4	58397.52	-11.40861	0.0000
D22	-629817.7	58191.41	-10.82321	0.0000

D23	-436540.4	61108.28	-7.143720	0.0000
D24	-661281.7	58065.51	-11.38855	0.0000
D25	-418452.2	59358.32	-7.049597	0.8046
D26	-14395.02	58143.17	-0.247579	0.0000
D27	-516828.8	58121.41	-8.892228	0.0000
D28	-689931.0	58120.51	-11.87070	0.0000
D29	-702724.9	58135.73	-12.08766	0.0000
D30	-554313.8	58136.52	-9.534693	0.0000
D31	-785260.1	58135.12	-13.50750	0.0000
D32	-647784.7	58126.59	-11.14438	0.0000
D33	24837.24	60848.33	0.408183	0.6834
R-squared	0.990005	Mean dependent var		850365.1
Adjusted R-squared	0.988853	S.D dependent var		1229766.
S.E. of regression	129836.5	Akaike info criterion		26.48594
Sum squared resid	4.97E+12	Schwarz criterion		26.88888
Log likelihood	-43351.81	Hannan-Quinn criter.		26.64667
F-statistic	8594219	Durbin-Watson stat		0.846566
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah, 2020

Model persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 891.761 - 5.69E-05 X1 - 1,05E-05 X2 + D2...D33$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan investasi dalam negeri maupun luar negeri akan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari nilai X1 dan X2 yang bertanda negative atau berkebalikan dengan variable dependennya.

Pengaruh masing-masing variable terhadap penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari Prob nya atau nilai t-hitung dibandingkan dengan t tabel. Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan Angka Kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari nilai t hitung sebesar -3,81 atau Probnya yang sangat kecil yaitu 0.001. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain (Permana, 2019), (Agustini dan Kurniasih, 2017), (Momongan, 2013), serta (Jonaidi, 2012). Berdasarkan hasil ini dapat diusulkan agar pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu secara terus menerus mendorong agar tercipta suasana investasi yang kondusif agar jumlah investasi dari pemodal dalam negeri akan terus meningkat di seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisa data panel sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 juga diketahui bahwa secara keseluruhan Foreign Direct Investment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai t statistic sebesar -8,53 dengan nilai Prob ( $\alpha$ ) nya

sebesar  $0 < 0.05$ . Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Magombeyi dan Odhiambo (2017) yang menyatakan bahwa Foreign Direct Investment berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan pada sebagian negara namun demikian ada juga yang tidak memberikan dampak yang signifikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Meyer (2004), Goorg & Greenaway (2004) menyatakan bahwa dampak positif berasal dari spillover effects sebagai hasil dari consumer and product surplus akibat interaksi berbagai industry. Penelitian lain yang dilakukan oleh Soumare (2015), Zaman et.al. (2012) juga menyimpulkan ada keterkaitan positif antara FDI dengan penurunan tingkat kemiskinan. Walaupun demikian ada beberapa peneliti menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara FDI dan penurunan tingkat kemiskinan (Gohou & Soumare, 2012), (Magombey & Odiambo, 2017). Sehingga berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dan dengan membandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat dinyatakan bahwa Foreign Direct Investment di Indonesia diperlukan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sehingga dapat dinyatakan bahwa investasi luar negeri sangat bermanfaat untuk menurunkan angka kemiskinan di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Penanaman Modal Dalam Negeri dan Investasi yang bersumber dari dana luar negeri mempunyai pengaruh signifikan untuk penurunan tingkat kemiskinan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Hasil ini terlihat dari angka R square dari kedua variable sebesar 99 persen yang menunjukkan bahwa 99 persen perubahan yang terkait variabel angka kemiskinan dapat dijelaskan oleh perubahan variable PMDN dan variable PMA. Demikian juga tingkat signifikansi dari masing-masing variable yang tinggi yang dapat dilihat dari hasil probabilitiknya yang lebih kecil dari 0.05 atau t hitung masing-masing variabel yang lebih besar dari t tabel.

### **REKOMENDASI**

Pemerintah Indonesia perlu untuk secara terus menerus membangun iklim investasi yang kondusif dan mendukung terciptanya peningkatan jumlah investasi di seluruh provinsi, baik yang dananya bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri. Terdapat provinsi yang dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kenapa ada provinsi

yang walaupun mendapatkan PMDN dan PMA tetapi masih belum berdampak pada penurunan angka kemiskinan di provinsi tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Y., & Kurniasih, E. P. (2017). Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2), 97-119.
- Anetor, F. O., Esho, E., & Verhoef, G. (2020). The impact of foreign direct investment, foreign aid and trade on poverty reduction: Evidence from Sub-Saharan African countries. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1737347.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of data panel*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Banovcinova, A., Levicka, J., & Veres, M. (2014). The impact of poverty on the family system functioning. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 132, 148-153.
- BKPM (2021). <https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-dalam-negeri-ddi>.
- Currie, J., & Stabile, M. (2003). Socioeconomic status and child health: why is the relationship stronger for older children?. *American Economic Review*, 93(5), 1813-1823.
- Do, Q. A., Le, Q. H., Nguyen, T. D., Vu, V. A., Tran, L. H., & Nguyen, C. T. T. (2021). Spatial Impact of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in Vietnam. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(7), 292.
- Dodge, K. A., Pettit, G. S., & Bates, J. E. (1994). Socialization mediators of the relation between socioeconomic status and child conduct problems. *Child development*, 65(2), 649-665.
- Dorojatun, K., Susanto, A.A. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Dalam Negeri terhadap Tingkat Kemiskinan. Universitas Gadjah Mada.
- Ekananda, M. (2018). Analisis Ekonometrika Data Panel Edisi 2: Teori Lengkap dan Pembahasan Menyeluruh Bagi Peneliti Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.
- Gerbery, D., Bodnárová, B., & Filadelfiová, J. (2007). Životné podmienky rodín v medzigeneračnej perspektíve. *Rodina a práca*, 1, 52.
- Gohou, G., & Soumaré, I. (2012). Does foreign direct investment reduce poverty in Africa and are there regional differences?. *World development*, 40(1), 75-95.

- Görg, H., & Greenaway, D. (2004). Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?. *The World Bank Research Observer*, 19(2), 171-197.
- Hanim, W. (2021). How Does Foreign Direct Investment (FDI) Reduce Poverty? Application of the Triangular Hypothesis for the Indonesian Case. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10, 400-411.
- Howes, S., Monk-Winstanley, R., Sefton, T., & Woudhuysen, A. (2020). Poverty in the Pandemic: The Impact of Coronavirus on Low Income Families and Children.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Kementrian Investasi (2021). <https://www.investindonesia.go.id>
- Magombeyi, M. T., & Odhiambo, N. M. (2017). Foreign direct investment and poverty reduction. *Comparative Economic Research*, 20(2), 73-89.
- Meyer, K. E. (2004). Perspectives on multinational enterprises in emerging economies. *Journal of international business studies*, 35(4), 259-276.
- Momongan, J. E. (2013). Investasi PMA Dan PMDN Pengaruhnya Terhadap Perkembangan PDRB Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- OECD (2021). OECD Economic Surveys. Indonesia.
- PERMANA, Y. A. (2019). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PMDN, PMA, Inflasi Dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2010–2016* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Soumaré, I. (2015). Does foreign direct investment improve welfare in North Africa. *Africa Development Bank*, 1-30.
- Word Bank (2020). <https://www.worldbank.org/en /topic/poverty>.
- Zaman, K., Izhar, Z., Khan, M. M., & Ahmad, M. (2012). RETRACTED: The relationship between financial indicators and human development in Pakistan.